



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/227/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/15/2023 TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung usulan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil untuk Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu merubah Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil Nomor 188.45/15/2023 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil Nomor 188.45/15/2023 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

x

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

9. Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil Nomor 188.45/15/2023 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.45/77/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil Nomor 188.45/15/2023 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/15/2023 TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Menambah Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan SKPK/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) masing-masing pada Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Juni 2023

20 Dzulqaidah 1444 H

W.a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;

8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/227 / 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/15/2023 TENTANG PERENCANAAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	SKPK	TENTANG	JENIS REVISI			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
1.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023	√			Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Mengatur Penggunaan Uang persediaan Tahun Anggaran 2023 dan Besarannya Persediaan	Adanya Pedoman pengelolaan Uang Persediaan	Bidang perbendaharaan
2.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Penghentian pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik			√		Mengatur Tata cara penerbitan SKPP melalui Aplikasi secara elektronik	Adanya pedoman penerbitan SKPP Gasi PNS	Bidang perbendaharaan
3.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pada Akhir Tahun Anggaran 2023	√				Mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran pada Akhir Tahun Anggaran	Adanya pedoman dan rangka akhir tahun Anggaran	Bidang perbendaharaan
4.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD Aceh Singkil			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur teknis mekanisme pengelolaan belanja tidak terduga di perintahan Kabupaten Aceh Singkil	Adanya Pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD Aceh Singkil	Bidang perbendaharaan

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
5.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengatur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Adanya pedoman Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel	BIDANG KEKAWAAN DAN ASET
6.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pemanfaatan Barang Milik Daerah			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengatur tata kelola barang milik daerah yang efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna	Adanya Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BIDANG KEKAWAAN DAN ASET
7.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pedoman Pemberian Fasilitas Sosial dan fasilitas umum di Kabupaten Aceh Singkil			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengatur Tata Kelola Barang Milik Daerah Tentang Pemberian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Adanya Pedoman Kelola Barang Milik Daerah Tentang Pemberian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	BIDANG KEKAWAAN DAN ASET
8.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengatur Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Adanya Pedoman Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil	BIDANG KEKAWAAN DAN ASET
9.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023			√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	BIDANG ANGGARAN
10.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023			√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	BIDANG ANGGARAN
11.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah ditingkatkan Pemerintah			√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	BIDANG ANGGARAN

X

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETTERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
12.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pejunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi daerah	Tahun Anggaran 2023.	Acuan Pejunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BIDANG ANGGARAN
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Badan Kampung Antar Waktu Permusyawaratan			√	Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung	Mengatur pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang mengundurkan diri dan pindah	Adanya pedoman pergantian antar waktu anggota BPKamp	
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Kepengurusan Posyantek dan Lembaga Posyantek			√	Permendes Nomor 23 Tahun 2017	Meningkatkan peran Masyarakat di Lembaga Posyantek diharapkan untuk percepatan Akselerasi Ahli teknologi kepada masyarakat.	Sebagai payung hukum bagi pengelola Posyantek di Kabupaten Aceh Singkil, Untuk pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga Kemasyarakatan Kampung	Kepengurusan Posyantek dan Lembaga Posyantek
15.	Bagian Organisasi Setdakab	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak			√	Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Sebagai dasar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETTERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
16.	Bagian Setdakab Organisasi	Unit Pelaksana Teknis Daerah Mesjid Agung Dinas Syariat Islam		√		Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Mesjid Agung Dinas Syariat Islam	Sebagai dasar acuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Mesjid Agung Dinas Syariat Islam	
17.	Bagian Setdakab Organisasi	Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2023		√		Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pedoman Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2023	Acuan Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2023	
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BKPSDM	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penambahan Sekretariat Korpri kedalam Susunan Organisasi BKPSDM	Dasar hukum Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BKPSDM	
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√			Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penyesuaian kembali Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dasar Hukum Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

✕

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
20.	Bagian Setdakab Hukum	Standar Operasional Dan Prosedur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional	Standar Operasional Dan Prosedur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Standar Operasional Dan Prosedur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana teah diubah diberlakukan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana teah diubah diberlakukan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	

✱

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	

✱

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kurang Bayar			√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Mekanisme pembayaran Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kurang Bayar	Acuhan Pembayaran Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kurang Bayar	
26.	Sekretariat DPRK	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan Besaran Jumlah penghasilan, Tunjangan kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Acuhan penetapan Jumlah penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	
27.	Sekretariat DPRK	Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan dan Jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Singkil			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan Besaran Jumlah penghasilan, Tunjangan kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Acuhan penetapan Jumlah penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil	√			Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026	Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil	
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Kerja pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	√			Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026	Pelaksanaan Rencana Kerja pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	
30.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	Pakaian Adat Perkawinan			√	Qanun Aceh Nomor 9 tahun 208 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat	Mengatur Pemakaian Pakaian pengantin dalam pelaksanaan dan Sunat Rasul	Adanya Regulasi yang menjadi pedoman tentang pemakaian Pakaian pengantin dalam pelaksanaan Pesta Perkawinan dan Sunat Rasul	
31.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	Motif Baju Khas Aceh Singkil			√	Qanun Aceh Nomor 9 tahun 208 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat	Menetapkan Motif Baju Khas Aceh Singkil	Adanya Regulasi yang mengatur khusus motif baju Khas Aceh Singkil	
32.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil			√	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	untuk memberikan pedoman tandatangan elektronik pada SPBE di Kabupaten Aceh Singkil dan sebagai pedoman pelaksanaan TNDE	Adanya Regulasi dalam penggunaan elektronik pada SPBE di Kabupaten Aceh Singkil dan sebagai pedoman pelaksanaan TNDE	Penambahan Propermepub pada Tahap I

✱

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
33.	UPPD Rumah Sakit Umum Daerah	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	mengatur definisi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Peraturan SAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP	Adanya regulasi kebijakan akuntansi keuangan memuat penjelasan unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
34.	UPPD Rumah Sakit Umum Daerah	Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	merupakan pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.	memuat, system akuntansi pendapatan, system akuntansi, beban dan belanja, system akuntansi pembiayaan, system akuntansi kas dan setara kas, system akuntansi kas, system akuntansi piutang, system akuntansi persediaan, system akuntansi investasi, system akuntansi aset tetap, system akuntansi asset lainnya, system akuntansi kewajiban, system akuntansi koreksi atas kesalahan, Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian.	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

✗

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
35.	UPPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Adanya regulasi dalam Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertubup pada Tahap I
36.	UPPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Pasal 76 dan 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiyai langsung dari anggaran pendapatan BLUD UPTD RSUD Kabupaten Aceh Singkil.	Adanya regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiyai oleh anggaran pendapatan BLUD UPTD RSUD Kabupaten Aceh Singkil dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu,	Penambahan Propempertubup pada Tahap I
37.	UPPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan menjadi dasar pengelolaan pegawai di RSUD Aceh Singkil	mengatur mekanisme pengelolaan pegawai BLUD berdasarkan prinsip ekonomis, efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia RSUD Aceh Singkil	Penambahan Propempertubup pada Tahap I

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETTERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
38.	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil		√		Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 92, dan Pasal 93 serta Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	pedoman bagi BLUD UPTD RSUD dalam melaksanakan pinjaman dan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat kepada masyarakat	mengatur pelaksanaan pinjaman dan investasi pada BLUD UPTD RSUD kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
39.	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Mengatur Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pelaksanaan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal, mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat, untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
40.	Sekretariat Daerah	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 188.354/39/2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

✱

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
41.	Sekretariat DPRK	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
42.	Inspektorat	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			ROUTIN	REVISI	BARU				
43.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil</p>	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
44.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.	Mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Penambahan Propempberbup pada Tahap I
45.	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan	Mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempberbup pada Tahap I

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			ROUTIN	REVISI	BARU				
46.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertubup pada Tahap I

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
47.	Dinas Kesehatan	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
48.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

H

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
49.	Dinas Sosial	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
50.	DP3AP2 & KB	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh		√		- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
51.	Dinas Pangan	Singkil Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertub pada Tahap I

X

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
52.	Dinas Lingkungan Hidup	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil</p>	Penambahan Propempertbup pada Tahap I
53.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil</p>	Penambahan Propempertbup pada Tahap I



NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
54.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	√			- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.	Mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propeperbup pada Tahap I
55.	Dinas perhubungan	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	√			- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi	Mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propeperbup pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
56.	Dinas Komunikas dan Informatika	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
57.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penysunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
58.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penysunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

15

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
59.	Dinas Perikanan	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Prokemperbup pada Tahap I
60.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Prokemperbup pada Tahap I

X

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETEPERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
61.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil		√		<p>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.</p> <p>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi.</p>	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil</p>	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

✕

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
62.	Dinas Perkebunan	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil		√		<p>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.</p> <p>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi.</p>	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propermepub pada Tahap I
63.	Dinda Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil		√		<p>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.</p> <p>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan</p>	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propermepub pada Tahap I

X

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
64.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertubup pada Tahap I
65.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penambahan Propempertubup pada Tahap I

A

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
66.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil		√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Pemerintah Penyelenggaraan Birokrasi. - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyelenggaraan Birokrasi. 	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

#

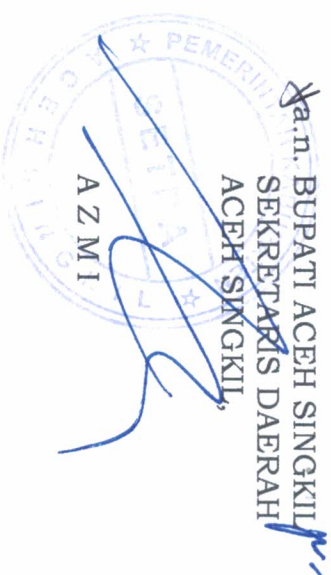
NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
67.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tata Naskah Dinas		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengatur Tata Tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Pedoman pengelolaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
68.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil		√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Memberikan kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman penyusunan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
69.	Bagian Setdakab Hukum	Staf Khusus Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil		√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bupati dan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah	melaksanakan tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Bupati guna percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Visi Pembangunan sesuai bidang tugasnya	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
70.	Sekretariat DPRK	Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah	√			Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Hak	Untuk mengatur Besaran Jumlah Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Jasa Pengabdian		Penambahan Propemperbup pada Tahap II

X

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
		Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil				Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil		
71.	Sekretariat DPRK	Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan belanja penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil		√		Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Untuk mengatur Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan belanja penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil		Penambahan Propermperbup pada Tahap II
72.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penggunaan Dana Kampung Untuk Konservasi keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat			√	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Untuk mengatur Penggunaan Dana Kampung Untuk Konservasi keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat	Pedoman Penggunaan Dana Kampung Untuk Konservasi keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat	Penambahan Propermperbup pada Tahap II
73.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh Singkil			√	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia	Untuk mensinergikan Informasi geospasial Tematik (IGT) Aceh Singkil melalui pengelolaan data dan informasi geospasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akurat, dinamis, valid, mudah diakses, dan	Terkoordinirnya pelaksanaannya dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propermperbup pada Tahap II

X

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
74.	Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan pada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil		√		Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Mententukan jenis biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dan lengkap	Mententukan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dan lengkap	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
75.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil		√		Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung	Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil	Kelancaran dan efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
76.	Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliah		√		Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan	Penyelenggaraan Diniyah berdasarkan Takmiliah Alquran dan Hadis, Pancasila dan UUD 1945	Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta Didik yang belajar di Sekolah Dasar dan Menengah sederajat	Penambahan Propemperbup pada Tahap II



 a.n. BUPATI ACEH SINGKIL

 SEKRETARIS DAERAH

 ACEH SINGKIL

 AZMI

